

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *sharia compliance* dengan proksi PSR, IsIR, IIR, EDR dan ZPR terhadap *fraud* di Bank Umum Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus *fraud* masih banyak terjadi pada bank syariah. Jumlah *fraud* mengalami fluktuasi tiap tahunnya dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2013 dengan jumlah 138 kasus dan terendah pada tahun 2015 dengan jumlah 25 kasus. Jumlah kasus *fraud* diperoleh dari jumlah kasus yang dilakukan oleh pihak dewan komisaris/direksi, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap. Ada beberapa faktor utama yang merupakan penyebab timbulnya *fraud* yaitu antara lain adanya kerja sama dengan pihak ketiga, adanya kerja sama antara karyawan perusahaan, adanya internal *control* yang kurang memadai, kurangnya kesadaran terhadap perbuatan yang salah dan adanya perbedaan dalam etika bisnis.
2. Tingkat *Profit Sharing Ratio* (PSR) tahun 2013-2019 menunjukkan bahwa presentase rata-rata PSR pada Bank Umum Syariah adalah 43,23%, berdasarkan standar penilaian PSR nilai tersebut termasuk kategori “baik” karena  $\geq 30\%$ . Maka dapat diketahui bahwa bank tersebut cukup berhasil dalam mencapai tujuan atas eksistensi mereka karena pembiayaan bagi hasil merupakan tujuan utama perbankan syariah. Pembiayaan bagi hasil lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif sedangkan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah yang lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah. Dalam pembiayaan *mudharabah*, *shahibul maal* harus membuat aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan *mudharib* melakukan tindakan yang merugikan *shahibul maal*. Maka dengan pembiayaan bagi hasil yang tinggi dapat meminimalisir tindakan *fraud*. Sehingga PSR memiliki pengaruh negatif terhadap *fraud*.
3. Presentase rata-rata tingkat IsIR tahun 2013-2019 adalah 99,97% artinya pendapatan di Bank Umum Syariah didominasi oleh pendapatan halal atau

dari sumber yang sesuai dengan ketentuan syariah, sedangkan tingkat pendapatan non halal hanya 0,03%. Walaupun nilai IsIR tinggi tetapi kenyataannya kasus *fraud* masih terjadi pada Bank Umum Syariah, hal tersebut dikarenakan pendapatan merupakan akun yang rentan untuk dimanipulasi dan pencurian, selain itu pada bank syariah masih terdapat praktik manajemen laba. Manajemen laba dapat terjadi ketika pihak manajemen yang mempunyai kepentingan tertentu menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya dan mengesampingkan kepentingan *principal*. Sehingga dengan adanya manajemen laba walaupun tingkat IsIR atau pendapatan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah tersebut tinggi tidak dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengurangi jumlah *fraud* yang terjadi di bank syariah. Maka IsIR tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud*.

4. Nilai IIR pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2019 menunjukkan bahwa investasi telah didominasi oleh investasi halal atau sesuai dengan ketentuan syariah yaitu dengan rata-rata presentase 96,87% sehingga presentase investasi non halal rendah yaitu sebesar 3,13%. Walaupun tingkat IIR tinggi tetapi pada kenyataannya masih terjadi kecurangan pada bank syariah. Hal ini dapat disebabkan karena aset merupakan akun yang rentan terhadap manipulasi dan pencurian. Sehingga investasi yang telah dilakukan sesuai ketentuan syariah tersebut tidak dapat memberikan kontribusi yang besar dalam mengurangi jumlah *fraud* yang terjadi pada bank syariah. Maka IIR tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud*.
5. Nilai EDR tertinggi diperoleh Panin Dubai Syariah pada tahun 2017 sebesar 3,36%. EDR ini digunakan untuk memastikan distribusi merata pada semua pihak, EDR mengedepankan adanya unsur keadilan dengan melakukan pemerataan pendapatan kepada semua pemangku kepentingan yaitu kepada masyarakat, investor dan perusahaan, masing-masing pihak diberikan hak sesuai dengan porsinya sehingga tidak akan mempengaruhi tindakan *fraud*. Menurut Khasanah (2016) pada dasarnya pemerataan pendapatan yang dilakukan oleh bank syariah masih terfokus pada penekanan alokasi dana pendapatan yang didistribusikan untuk perusahaan dan karyawan itu sendiri

sedangkan, untuk investor dan masyarakat dikatakan masih relatif rendah tingkatannya. Tingginya pendapatan yang didapat ini memungkinkan terjadi karena adanya manipulasi untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian untuk investor dan masyarakat. Sehingga EDR memiliki hubungan positif terhadap *fraud*.

6. Presentase rata-rata nilai ZPR pada Bank Umum Syariah tahun 2013-2019 adalah 0,043%, berdasarkan standar penilaian ZPR dapat dikatakan baik apabila  $\geq 35\%$  maka tingkat ZPR tahun 2013-2019 dapat dikatakan “kurang baik”. Hal ini karena jumlah zakat yang dibayarkan kecil, dapat dilihat dengan adanya peningkatan aset bersih namun rasio zakat yang dibayarkan cenderung tetap. Rasio ini menggunakan aset bersih untuk mencerminkan kekayaan bank syariah yang digunakan sebagai penentu besar jumlahnya zakat yang harus dibayar. Apabila jumlah zakat yang dibayarkan tinggi berarti jumlah aset bersih nya juga tinggi, sedangkan aset merupakan akun yang rentan terhadap manipulasi. Sehingga ZPR berpengaruh positif terhadap *fraud*. Tetapi bank syariah perlu meningkatkan aktivitas zakat karena zakat dapat berperan sebagai variabel kontrol dan variabel kebijaksanaan, zakat juga merupakan salah satu ciri khas ekonomi Islam karena tujuan utama dari pendirian bank syariah adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme zakat.
7. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu sampel penelitian hanya dilakukan pada 8 bank syariah, dan terbatasnya referensi atau penelitian terdahulu mengenai pengaruh *sharia compliance* terhadap *fraud*, dan sampel penelitian hanya menggunakan bank umum syariah saja yang mengakibatkan hasil analisis ini tidak dapat digeneralisir untuk semua lembaga keuangan syariah.

## 5.2 Implikasi

Implikasi dari hasil temuan riset ini yaitu untuk bank syariah diharapkan untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil karena lebih menggerakkan sektor riil dan menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan *fraud* sedangkan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah yang lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah dan dinilai kurang mencerminkan karakteristik dari bank

syariah. Walaupun tingkat investasi halal dan pendapatan halal tinggi tetapi ternyata tidak memberikan kontribusi besar dalam mengurangi jumlah *fraud*. Walaupun demikian bank syariah harus tetap meningkatkan kepatuhan syariah dan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud* itu sendiri.

Untuk mengurangi tindakan *fraud* ini manajemen diharapkan memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku sehingga membuat para calon pelaku takut untuk melakukan tindakan *fraud*. Faktor yang paling penting sebenarnya adalah unsur keimanan. Benteng iman yang kokoh akan dapat menjamin kebaikan hidup seseorang. Karena iman mempengaruhi amal perbuatan, sehingga akan mengindarkan dalam perbuatan buruk. Maka sebesar apapun tekanan, motivasi dan peluang atau kesempatan yang kita miliki untuk melakukan tindakan *fraud*, sehebat apapun kemampuan kita dalam memanipulasi peluang *fraud* dan menciptakan rasionalisasi, namun jika ditopang dengan benteng iman yang kokoh, maka akan menghindarkan terjadinya perilaku *fraud*, karena ia mengetahui akan mendapatkan sanksi baik di dunia maupun akhirat dan dengan menghindari perbuatan tersebut juga terdapat pahala yang akan didapat.

### 5.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah
  - a. Diharapkan melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan itu sendiri dengan menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Bank syariah perlu membuat langkah pencegahan *fraud* untuk menciptakan pengendalian kontrol internal yang solid dan komprehensif. Tujuannya adalah agar seluruh karyawan bank syariah sadar dan merasa bertanggungjawab.
  - b. Memperketat pelaksanaan SOP dengan menerapkan menerapkan sistem *reward* dan *punishment* untuk karyawan.
  - c. Membangun rintangan bagi terjadinya kolusi, jika *fraud* disertai dengan kolusi akan lebih sulit untuk mendeteksinya maka diperlukan job transfer atau merotasi personel secara periodik.

- d. Bank syariah juga harus selektif dalam memperkerjakan SDM dengan melihat kemampuannya baik dari ilmu perbankan maupun agamanya serta etika, moral, kepribadian dan perilaku calon karyawan.
  - e. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku *fraud*, sehingga menimbulkan efek jera dan membuat calon pelaku *fraud* mengurungkan niatnya.
2. Bagi *stakeholder*
- a. Bagi karyawan  
Perilaku *fraud* bisa disebabkan oleh kurang pahamnya karyawan akan visi misi perusahaan atau karena terpengaruh oleh karyawan lain, maka dari itu perlu diciptakan lingkungan kerja yang positif, profesional, kompeten.
  - b. Bagi perusahaan  
Diharapkan pelaksanaan strategi *anti fraud* berjalan lebih optimal maka sebaiknya dilakukan peningkatan intensitas pelatihan terkait pencegahan *fraud* pada perbankan. Memperhatikan kesejahteraan karyawan, memberikan wadah komunikasi khusus untuk media pelaporan tindak kecurangan sehingga pelapor merasa aman.
3. Bagi pembuat kebijakan
- a. Memperbaiki sistem dan menyusun strategi *anti fraud* dengan melihat contoh penerapan pada negara lain yang lebih baik sebagai pembanding.
  - b. Dalam kebijakan diberi sanksi yang tegas seperti ancaman pidana, membayar pengganti kerugian namun hal ini bukan hanya sebatas aturan teoritis tetapi harus dipatuhi dan diterapkan.
4. Bagi peneliti selanjutnya
- a. Diharapkan untuk memperluas populasi dengan menambah jenis lembaga keuangan syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Asuransi Syariah serta menambah periode penelitian.
  - b. Diharapkan untuk menambah variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap *fraud* mengingat variabel *sharia compliance* dalam model ini hanya mampu menjelaskan sebanyak 45% variasi variabel *fraud* pada Bank Umum Syariah.